



ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JURISTES DEMOCRATES
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DEMOCRATIC LAWYERS
ASOCIACION INTERNACIONAL DE JURISTAS DEMOCRATAS
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ ДЕМОКРАТОВ
國際民主法律家協會
رابطة الحقوقيين الديمقراطيين العالمية

Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sesi ke-39

Butir 4 - Situasi yang membutuhkan perhatian Dewan - Debat Umum

Musim panas lalu serangkaian gempa bumi dahsyat dan gempa susulan menghantam pulau Lombok di Indonesia, menyebabkan banyak korban jiwa dan kerusakan luas. Dalam beberapa detik seluruh desa telah menjadi puing-puing, bersama dengan mata pencaharian penduduk mereka.

Kelemahan dari tanggap darurat dan kurangnya strategi pencegahan, mitigasi dan persiapan bencana yang memadai, menyebabkan krisis kemanusiaan yang nyata di wilayah tersebut. Sementara pihak berwenang mengangkat keadaan darurat pada 25 Agustus, di banyak daerah orang masih membutuhkan tempat penampungan, selimut, tikar, makanan, air bersih dan akses ke layanan dasar seperti sanitasi dan perawatan kesehatan. Selain itu, menghabiskan berminggu-minggu di tenda darurat, sering penuh sesak, mengambil korban pada kesehatan masyarakat. Situasi yang mengerikan dari orang-orang yang selamat dari gempa bumi, dan khususnya para IDP, kemungkinan akan menjadi lebih buruk dalam beberapa minggu mendatang karena musim hujan yang akan datang.

Petani dan orang lain yang tinggal di daerah pedesaan yang miskin secara tidak proporsional terpengaruh oleh bencana tersebut. Terutama tergantung pada pertanian tadah hujan untuk asupan gizi dasar mereka dan dengan aset keuangan yang terbatas jika tidak ada, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka bahkan sebelum gempa bumi. Sekarang mereka benar-benar bergantung pada bantuan eksternal dan mereka bertahan hidup hanya berkat amal dan bantuan para relawan. Upaya pemulihan berisiko untuk mengabadikan dan bahkan memperkuat kerentanan dan pola diskriminasi yang sudah ada sebelumnya.

Negara memiliki kewajiban untuk melakukan segala sesuatu dalam kekuasaan mereka untuk mengurangi konsekuensi negatif dari bahaya alam. Sangat mendesak untuk mengatasi kebutuhan yang paling rentan. Kemiskinan dan

pengecualian bukanlah bencana alam, tetapi hasil dari kebijakan yang disengaja yang perlu segera diubah.

IADL mendesak pemerintah Indonesia untuk mematuhi kewajiban dan komitmen internasionalnya dan karenanya:

- untuk mengambil tindakan segera untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia diintegrasikan ke dalam respons bencana, termasuk dalam fase pemulihan dan rekonstruksi;
- untuk memberikan akses yang sama terhadap bantuan kemanusiaan dan bantuan rekonstruksi untuk semua masyarakat yang terkena dampak tanpa diskriminasi;
- untuk melindungi hak semua korban gempa bumi terhadap standar kehidupan yang layak termasuk makanan, air, sanitasi, perumahan yang layak, serta hak atas pendidikan dan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai;
- untuk menjamin keterbukaan dalam semua fase manajemen bencana, untuk memastikan pengawasan publik dan akuntabilitas dalam distribusi bantuan;
- untuk membangun kembali perumahan dan infrastruktur publik ke standar keselamatan yang lebih tinggi untuk meminimalkan risiko bencana dan membantu melunakkan rasa takut dan trauma para korban;
- untuk memastikan bahwa hak-hak petani dan orang lain yang hidup di daerah pedesaan, sepenuhnya dipertimbangkan dalam rencana rekonstruksi pascabencana. Mengembalikan mata pencaharian mereka, termasuk dengan menyediakan mereka dengan sistem irigasi yang memadai, akses ke benih dan pupuk yang terjangkau harus menjadi prioritas;
- untuk mengadopsi dan menerapkan tanpa penundaan kebijakan dalam memberantas kemiskinan, yang merupakan penentu utama kerentanan penduduk terhadap bencana alam, dan untuk mendorong pembangunan juga agar berkontribusi untuk meminimalkan risiko bencana.

18 September 2018